

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern sekarang ini, suatu institusi atau lembaga publik negara membutuhkan adanya sistem pemerintahan yang kuat dan juga bersih atau yang dikenal dengan *type of a clean or good govermance* (Roni Ekha Putera, 2016).Adanya tuntutan seperti itu sehingga transparansi laporan keuangan kini semakin diperhatikan oleh negara berkembang, terutama Indonesia. Maksud tujuannya yaitu supaya masyarakat bisa melihat apa yang terjadi dan akan dikerjakan lembaga pemerintahan mengenai penggunaan anggaran yang ada dalam replika terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya transparansi penyediaan informasi pada pelayanan sektor publik di Indonesia, hal ini didukung oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara jelas undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara transparan dengan tanggung jawab dan orientasi terhadap pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk diakses cepat, efisien dan juga mudah dipahami masyarakat (Nosihana dan Yaya, 2016).Transparansi merupakan salah satu ciri pengelolaan keuangan dan juga merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas maka sesuai dengan Q.S An-Nissa ayat 58, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimnaya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi ganjaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Q.S An-Nissa ayat 58 telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar dapat menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak untuk mengetahui. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi kepada setiap pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut seperti ke publik atau masyarakat luas. Penyampaian amanat haruslah sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan tanpa adanya tindakan mengurangi atau melebihkan, sesungguhnya Allah SWT selalu melihat dan mendengar apapun yang kita kerjakan semasa hidup.

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi maka akses yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi juga seharusnya semakin mudah. Seperti halnya internet, teknologi ini mempermudah setiap penggunanya dalam pertukaran informasi dengan cepat dan mudah. Pada perkembangan teknologi digital khususnya di bidang informasi internet sehingga banyak pengguna internet di kalangan masyarakat menjadi cermin bahwa internet merupakan suatu kebutuhan yang penting. Terjadinya proses digitalisasi pada seluruh organisasi karena pembiayaan yang relatif lebih murah saat menggunakan teknologi dalam penyampaian sebuah informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah dan meningkatkan tingkat aktivitas dari entitas ekonomi, yang awalnya dilakukan secara manual dan konvensional menurut Puspita dan Martani dalam Hudoyo dan Mahmud (2014).

Pemerintah daerah juga menggunakan suatu media untuk membagikan informasi mengenai kegiatan pemerintah daerah yaitu menggunakan website pemerintah daerah yang resmi. Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah dari pusat hingga daerah menjadi *good governance* dengan cara membangun situs webnya masing-masing sehingga dapat memperkenalkan potensi sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian intruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika dengan dikeluarkannya Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah dan *Blue Print* implementasi aplikasi *e-government* Pemda di Indonesia (Mutiha, 2017).

Hasil survei yang dilakukan Jaya dan Verawaty (2015) terkait dengan situs web yang dilaksanakan oleh populasi penelitian yaitu 34 provinsi menunjukkan bahwa 76,47% dari pemerintah di pemerintah provinsi dalam status online atau hanya 26 e-pemerintah. Hasilnya juga menunjukkan perbedaan praktik pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government* dan sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Total *e-government* aktif pemerintah provinsi menunjukkan bahwa hanya 76,92% yang menyediakan *Internet Financial Reporting* (IFR). Dalam hal IFR dari populasi 34 provinsi, hanya 20 sampel yang memenuhi kriteria sampel yang menyediakan fitur IFR dalam e-government mereka.

Didalam penelitian Verawaty (2015) mengatakan bahwa dengan adanya IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* adalah alat yang

memenuhi aspek *value of money* atau 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) atau media yang bagus untuk mengumumkan dan menyediakan suatu informasi tentang laporan keuangan pada setiap stakeholder publik seperti pemerintah pusat daerah, BPK, DPRD, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat. Peningkatan transparansi diperlukan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan mengakibatkan pemborosan. Menurut laporan Indeks Persepsi Korupsi 2016 dalam Idris dkk (2018), Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara, turun dua peringkat dibandingkan dengan 2015 yang berada di peringkat ke-88. Di peringkat teratas ada Denmark, Kanada, Finlandia, Swedia dan Swiss yang ditandai oleh transparansi dalam proses birokrasi, melibatkan keterlibatan warga negara, kebebasan media dan sistem peradilan yang independen. Negara-negara ini memungkinkan warga negara mengakses informasi tentang bagaimana anggaran publik digunakan. Untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut maka diperlukan adanya pengungkapan laporan keuangan atau *Internet Financial Report* pada sektor publik melalui media *e-government* (Verawaty,2015).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan IFR atau Internet Financial Reporting pada sektor publik yaitu pemerintah daerah melalui *e-government* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti Rahman, dkk. (2013) menemukan bahwa variabel *political competition, leverage, local government wealth* berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kota (kabupaten) di Indonesia. Susbiyani, dkk. (2014) menemukan bahwa variabel *size of local government, type of local government,*

wealth berpengaruh signifikan *mandatory disclosure*. Susiyah, dkk. (2018) mengatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan IRF. Dimana semakin besar aset Pemeritah Daerah, namun tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai mengenai standar yang berlaku dan pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya, maka akan menyebabkan Pemeritah Daerah tidak terdorong untuk mengungkapkannya di website. Kekayaan Pemerintah Daerah (*Wealth*) berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan IRF di Website.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktek Internet Financial Reporting Pemda, seperti Nosihana dan Yaya (2016), Hudoyo dan Mahmud (2014), Junaedi (2015), Arthaingan H. Mutiha (2017), Diptyanaa dan Rokhmaniab(2018), Rahman dkk (2013), Susiyah dkk(2018), Alhajjriana dkk(2017) dengan kesimpulan penelitian yang tidak konsisten antar penelitian yang ada.

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk menganalisis aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* dengan variabel-variabel yang diasumsikan memiliki hubungan positif, yaitu *size*, *debt*, *income per capita*, dan *debt level* pemerintah daerah serta implikasinya penerapan IFR dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 (informasi mengenai laporan keuangan saja). Hasilnya menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size*, *income per capita*, dan *debt level* dengan aksesibilitas laporan keuangan. (Verawaty,2015).

Penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi yang mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Verawaty (2015) dengan judul Determinan Aksesibility Internet Financial Reporting Melalui *E-Government* Pemerintah Daerah Di Indonesia, menggunakan variabel *size*, *income per capital*, dan *debt level*. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabelkekayaan daerah dan opini audit.

Variabel kekayaan daerah (*wealth*) digunakan karena semakin tinggi kekayaan daerah maka semakin besar pendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya melalui internet. (Junaedi, 2015). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah (*wealth*) memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga bisa dianggap sebagai wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya, hal ini merupakan sinyal positif bagi daerah baik secara ekonomi maupun politik. Peneliti juga menambahkan variabel opini audit didasari atas pelaporan keuangan pemda yang baik akan mendapat suatu penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan tersebut. Sehingga penyajian laporan keuangan di internet akan dipengaruhi oleh opini audit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Junaedi (2015) dalam penilitiannya bahwa opini audit akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan di internet.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial**

Reporting (IFR) di Indonesia (studi empiris pada pemda kota/kabupaten seluruh Indonesia)”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Verawaty (2015) dengan variabel variabel *size*, *income per capital*, dan *debt level*. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan tiga variabel independen yaitu variabel kompetisi politik, kekayaan daerah, opini audit. Variabel kompetisi politik dan kekayaan daerah diambil dari penelitian yang dilakukan Rahman dkk (2013), sedangkan variabel opini audit diambil dari penelitian yang dilakukan Junaedi (2015). Penambahan variabel pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia untuk menciptakan *good governance* dan *clean governance* yang terkait dengan pelaporan *Internet Financial Reporting*, agar tercapai transparansi dan akuntabilitas publik.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemda pada penelitian ini yaitu : kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang, pendapatan perkapita, kekayaan daerah, opini audit terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) pemda. Dalam penelitian ini peneliti meneliti enam variabel tersebut dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus pada permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat menafsirkan dengan akurat dan tepat. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda ?
2. Apakah ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda ?
3. Apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda ?
4. Apakah pendapatan perkapita penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda ?
5. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda ?
6. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetisi politik terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran pemda terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh rasio pembiayaan utang terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan perkapita penduduk terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) Pemda.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk akademisi dapat berkontribusi dalam penelitian selanjutnya dan dapat juga dapat menambah wawasan serta informasi terkait akuntansi sektor publik, khususnya pada *internet financial reporting*.

2. Manfaat Praktik

1. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* dan *clean governance* yang terkait dengan pelaporan *Internet Financial Reporting*, agar tercapai transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Manfaat bagi perguruan tinggi

Harapannya setelah penelitian ini diterbitkan dalam jurnal dan dipublikasikan, penelitian dapat membantu akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

3. Manfaat bagi Stakeholder

Stakeholder yaitu masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah melalui pelaporan *internet financial reporting* di internet.